

Implementasi Collaborative Governance dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses DPRD Kabupaten Merauke

Maria Margareta Reginaldis^{1)*}, Hetwika Maria Herda kelanit²⁾, Felix Rada³⁾, Yuliana Evarista⁴⁾

^{1,2,3,4} STIA Karya Dharma Merauke, Indonesia

email: : reginaldis323@gmail.com¹⁾, herdakelanit73@gmail.com²⁾, felixrada@gmail.com³⁾,
yulianaevartista@gmail.com⁴⁾

(Diterima Januari 2026); Disetujui Februari 2026); Dipublikasikan Maret 2026)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi collaborative governance dalam penyerapan aspirasi masyarakat pada masa reses DPRD Kabupaten Merauke serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap anggota DPRD, Bappeda, serta dokumen perencanaan daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance telah berlangsung melalui mekanisme dialog tatap muka (face-to-face dialogue), pembangunan kepercayaan melalui interaksi sosial informal, serta upaya membangun komitmen antaraktor. Namun, proses kolaborasi belum optimal karena masih bersifat administratif dan belum mencapai tahap deliberatif. Hambatan utama meliputi ketidaksinkronan antara aspirasi masyarakat dan prioritas RPJMD, keterbatasan anggaran, dominasi birokrasi, serta rendahnya akuntabilitas tindak lanjut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipasi publik yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan serta pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: collaborative governance, reses DPRD, aspirasi masyarakat, partisipasi publik, akuntabilitas

Abstract

This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in absorbing public aspirations during the recess period of the Regional House of Representatives (DPRD) in Merauke Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors influencing the process. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving DPRD members, regional planning agencies (Bappeda), and regional development planning documents. The findings indicate that collaborative governance practices have been implemented through face-to-face dialogue during recess activities, trust-building through informal social interactions, and efforts to establish commitment among stakeholders. However, the implementation remains procedural and has not yet reached a deliberative and transformative stage. The collaborative process is constrained by several factors, including misalignment between public aspirations and regional development priorities, limited financial resources, hierarchical bureaucratic structures, and weak accountability mechanisms. Furthermore, the study reveals that the outcomes of collaborative processes are mostly partial and short-term, lacking systemic impact on regional development policies. This condition reflects the absence of effective integration between participatory mechanisms and formal planning systems. This study recommends strengthening participatory governance through institutional integration of public aspirations into development planning, as well as the adoption of digital accountability platforms to enhance transparency, responsiveness, and policy effectiveness.

Keywords: collaborative governance, public aspirations, DPRD recess, participation, accountability

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan institusi yang sangat penting dalam sistim pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai representasi politik masyarakat. Dalam kerangka demokrasi lokal, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah kegiatan reses. Reses merupakan bentuk komunikasi langsung antara wakil rakyat dan konstituennya yang dilakukan secara berkala sebagai bagian dari fungsi representasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014).

Kegiatan reses tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan ruang deliberatif yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, proses ini seharusnya mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik (Habermas, 1996). Namun dalam praktiknya, seringkali aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak sepenuhnya terealisasi dalam kebijakan publik.

Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Merauke, dimana kegiatan reses cenderung menjadi rutinitas formal tanpa dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat seringkali tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD atau APBD. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses partisipatif dan sistem perencanaan formal. Dalam konteks administrasi publik modern, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Ansell dan Gash (2008) dalam (Noor, Muhammad, Suaedi, Falih, Mardiyanta, 2022) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara langsung, berbasis konsensus, dan deliberatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan.

Lebih lanjut, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan kerangka *collaborative governance regime* yang menekankan tiga komponen utama, yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Model ini memperluas pemahaman bahwa kolaborasi tidak hanya terjadi pada level interaksi, tetapi juga membutuhkan dukungan institusional dan kapasitas aktor (Qomariyah, 2023). Dalam konteks Kabupaten Merauke, implementasi *collaborative governance* menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Pertama, adanya pengaruh kedekatan politik dalam menentukan prioritas aspirasi yang direalisasikan. Kedua, rendahnya literasi politik masyarakat yang menyebabkan aspirasi cenderung bersifat pragmatis dan jangka pendek. Ketiga, dominasi birokrasi yang masih bersifat hierarkis sehingga menghambat partisipasi yang setara. Selain itu juga, terdapat masalah akuntabilitas dalam tindak lanjut hasil reses. Banyak aspirasi yang tidak memiliki kejelasan status implementasi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Hal ini sejalan dengan temuan Bovaird (2007) dalam (Agus, 2011) yang menyatakan bahwa kegagalan kolaborasi seringkali disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori *collaborative governance* dan implementasi kebijakan dalam menganalisis penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi masih bersifat administratif dan belum terintegrasi dengan sistem perencanaan daerah, sehingga menghasilkan outcome yang parsial dan

masyarakat. Masyarakat cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan aspirasi ketika terdapat hubungan sosial yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menyatakan bahwa *shared motivation* menjadi fondasi penting dalam proses kolaborasi. Namun demikian, kepercayaan yang terbentuk masih bersifat personal dan belum terinstitusionalisasi. Kepercayaan masyarakat seringkali masih bergantung pada individu anggota DPRD, bukan pada sistem atau kelembagaan DPRD secara keseluruhan.

3. *Komitmen Antar Aktor dalam Menindaklanjuti Aspirasi*

Komitmen merupakan aspek yang krusial dalam keberhasilan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara komitmen yang disampaikan dalam forum reses dengan realisasi aspirasi di lapangan. Banyak aspirasi masyarakat yang tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah atau tidak masuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja DPRD.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980) dalam (Reginaldis and Supriyono, 2024), dimana keterbatasan sumber daya dan lemahnya komunikasi menjadi faktor utama kegagalan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.

4. *Pemahaman Bersama (Shared Understanding)*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi keselarasan antara aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan masyarakat umumnya bersifat kebutuhan langsung seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan fasilitas dasar. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Ketidaksinkronan ini menunjukkan lemahnya integrasi antara mekanisme partisipatif dan sistem perencanaan formal.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam AG. Subarsono, (2021), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan dan kesesuaian antara kebijakan dan kondisi lapangan. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah menyebabkan proses kolaborasi menjadi tidak efektif.

5. *Intermediate Outcome sebagai Hasil Sementara*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intermediate outcomes* yang dihasilkan dari proses kolaborasi masih bersifat parsial dan jangka pendek. Bentuk realisasi aspirasi lebih banyak berupa bantuan individu atau program kecil yang tidak memiliki dampak sistemik terhadap pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi belum mampu menghasilkan perubahan struktural dalam kebijakan publik. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa proses kolaborasi masih berada pada tahap awal dan belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan.

6. *Faktor Pendukung dan Penghambat*

Faktor Pendukung antara lain: Komunikasi langsung melalui reses, Kedekatan sosial antara DPRD dan masyarakat dan Komitmen personal anggota DPRD. Sedangkan Faktor Penghambat dalam konteks penelitian antara lain: Keterbatasan anggaran, Dominasi birokrasi

Kabupaten Merauke dan Kepala Bappeda Kabupaten Merauke atas segala bentuk motivasi yang diberikan kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak – pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono (2021) Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar.
- Agus, D. (2011) Mengembalikan kepercayaan publik melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Available at: [ooks.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hF9nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=dwiyanto+agus&ots=yU2kx0XK6e&sig=MEA1AzBwlnVOLy3gLLEOI9C42sM&redir_esc=y#v=onepage&q=dwiyanto+agus&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hF9nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=dwiyanto+agus&ots=yU2kx0XK6e&sig=MEA1AzBwlnVOLy3gLLEOI9C42sM&redir_esc=y#v=onepage&q=dwiyanto+agus&f=false).
- Ansell, C. and Gash, A. (2008) ‘Collaborative Governance in Theory and Practice’, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Arnstein, S.R. (1969) ‘A ladder of citizen participation’, *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), pp. 216–224.
- Noor, Muhammad, Suaedi, Falih, Mardiyanta, A. (2022) Collaborative Governance suatu tinjauan teoritis dan praktik. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, Bantul.
- Qomariyah, E. (2023) Collaborative Governance. 1st edn. Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Reginaldis, M.M. and Supriyono, B. (2024) ‘IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY TO REALIZE VILLAGE SELF-RELIANCE’, pp. 1–21.